Wacana Publik
Volume 19, No. 1, Juni 2025, pp. 7–16

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI BANDAR LAMPUNG

Lilih Muflihah[1*], Maulana Mukhlis[2], Feni Roslia[3]
[1,2,3]Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
[*]Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandarlampung, Indonesia
*Korespondensi: lilih.muflihah@fisip.unila.ac.id

Recieved: 14/10/2024 | Revised: 13/5/2025 | Accepted: 1/6/2025

Abstract

Waste is a serious problem in the city of Bandar Lampung, with the level of waste production continuing to increase and a lack of awareness of the importance of good waste management. This research aims to explore public perceptions of waste management in Bandar Lampung. The research method used was a survey with a questionnaire distributed to a sample of people in Kedaton District and Tanjung Senang District, Bandar Lampung City. The collected data is then analyzed using statistical techniques to find patterns and trends in public perceptions of waste management. The results of this research show that there is a positive perception from the public regarding waste management in Bandar Lampung. Public perception of waste management services in Kedaton District is in the high and medium categories in Tanjung Senang District. There are no waste banks and socialization of waste management so that most people in the two sub-districts manage their waste independently by throwing their waste into rubbish dumps, some of which are even burned and the obstacles in waste management are on the side of the government and the community.

***Keywords**: waste management, environment, community perception*

Abstrak

Sampah menjadi masalah serius di kota Bandar Lampung, dengan tingkat produksi sampah yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner yang disebar kepada sampel masyarakat di Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menemukan pola dan tren dalam persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi positif dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Persepsi Masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Kedaton masuk dalam kategori tinggi dan sedang di Kecamatan Tanjung Senang. Tidak ada bank sampah dan sosialisasi pengelolaan sampah sehingga kebanyakan masyarakat di kedua kecamatan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang dibakar dan kendala dalam pengelolaan sampah berada di sisi pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan sampah, lingkungan, persepsi masyarakat

PENDAHULUAN

Kegiatan pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan yang berkelanjutan sehingga diperlukan upaya pengendalian operasional agar sampah lebih berdaya guna dan berhasil untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi.

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Kota Bandar Lampung masih terbatas pada sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah dan akhirnya dibuang ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang menggunakan *system open dumping* atau sebatas meratakan sampah menggunakan alat berat saja. Selain itu infrastuktur persampahan dari tingkat tapak sampai tingkat TPA, sarana dan prasarana pengangkut dan pengolah persampahan sampai dengan minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengolahan sampah di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tersebut dapat membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan serta dapat menyebarkan penyakit menular.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 Pasal 5 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Kemudian Pasal 6 menyebutkan tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolan sampah;
e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban, yaitu:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi label lingkungan; produk yang ramah
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 Pasal 13 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sementara Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbunan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

Sistem pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat enam fungsi elemen yaitu timbulan sampah, penanganan sampah pada sumber, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan pemindahan dan pengangkutan, serta pembuangan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yang dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 2011).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana. Sementara teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Berdasarkan analisis secara statistik, bahwa distribusi dari rerata jumlah responden sebesar 30 akan mendekati normal, maka jumlah tersebut sudah mewakili karakteristik dari populasi penelitian (Yunus, 2010). Namun dalam penelitian ini diambil 50 sampel di Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Karakteristik responden pada penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan tingkat Pendidikan.

Ada beberapa alasan yang kuat untuk menambah sampel responden dari 30 menjadi 50 dalam sebuah penelitian, khususnya dalam penelitian yang melibatkan persepsi masyarakat. Beberapa alasan tersebut yaitu:

a. Meningkatkan validitas statistik karena semakin akurat hasil penelitian dalam menggambarkan populasi secara keseluruhan.
b. Meningkatkan reliabilitas data karena membantu mengurangi variasi acak dalam data sehingga hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.
c. Mengakomodasi variasi dalam populasi sehingga menangkap lebih banyak variasi atau perbedaan dalam pandangan dan opini, dengan populasi heterogen (beragam dalam usia, jenis kelamin, pendidikan, dll.).
d. Mengurangi risiko bias sampel.
e. Antisipasi kehilangan responden, ada margin lebih besar untuk mengakomodasi kehilangan data akibat responden yang tidak mengisi kuesioner dengan benar atau keluar dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden mengacu pada ciri-ciri atau atribut yang membedakan satu kelompok sosial dari kelompok lainnya. Dalam penelitian ini, karakteristik masyarakat meliputi, umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

Tabel 2. Karakteristik Umur Responden

No	Kelompok Umur (tahun)	Kecamatan Kedaton		Kecamatan Tanjung Senang	
		(f)	(%)	(f)	(%)
1	<25	12	24	19	38
2	25-30	21	42	7	14
3	31-45	13	26	10	20
4	>45	4	8	14	28

Sumber: Data Penelitian, 2024

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

Sementara karakteristik responden berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan Kedaton		Kecamatan Tanjung Senang	
		(f)	(%)	(f)	(%)
1	SMP	4	8	0	0
2	SMA/SMK	39	78	39	78
3	S1	7	14	11	22

Sumber: Data Penelitian, 2024

Adapun karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Kecamatan Kedaton		Kecamatan Tanjung Senang	
		(f)	(%)	(f)	(%)
1	Ibu Rumah Tangga	7	14	13	26
2	Pegawai Swasta	7	20	8	16
3	Wiraswasta	10	18	5	10
4	Mahasiswa	10	14	19	38
5	Pedagang	9	20	0	0
6	Lainnya	7	10	5	10

Sumber: Data Penelitian, 2024

Persepsi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota

Sugihartono et al. dan Nugraha et al. (2018) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses di mana otak menginterpretasikan rangsangan yang diterima oleh indera manusia. Dalam proses ini, terdapat berbagai sudut pandang dalam penginderaan. Beberapa orang mungkin melihat sesuatu sebagai hal yang baik, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai hal yang buruk. Persepsi, baik positif maupun negatif, akan mempengaruhi tindakan nyata yang diambil oleh seseorang. Terkait pengelolaan sampah diartikan sebagai pendapat atau pandangan seseorang terhadap kegiatan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pengelolaan sampah tersebut mencakup kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

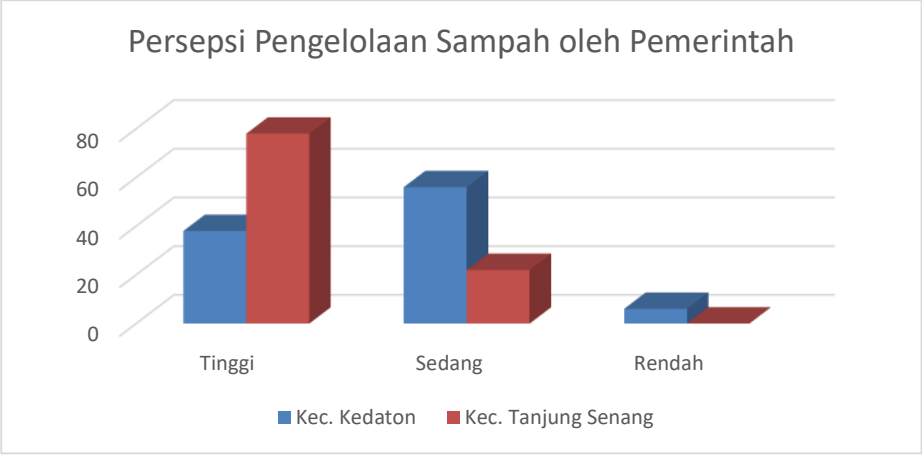

Gambar 1. Persepsi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah
Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa persepsi responden di Kecamatan Kedaton mengenai pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 38% menyatakan tinggi dan 56% menyatakan sedang. Sementara persepsi responden di Kecamatan Tanjung Senang mengenai pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 78% menyatakan tinggi dan 22% menyatakan sedang.

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

Persepsi Masyarakat tentang Fasilitas Pengelolaan Sampah

Fasilitas pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengolahan sampah bisa melalui beberapa tahap untuk bisa sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah yang dihasilkan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), diangkut, dan dikelola, dan dibuang hingga sampai ke TPA. Lokasi TPA harus terisolir guna menghindari dampak negatif yang bisa timbul terhadap lingkungan.

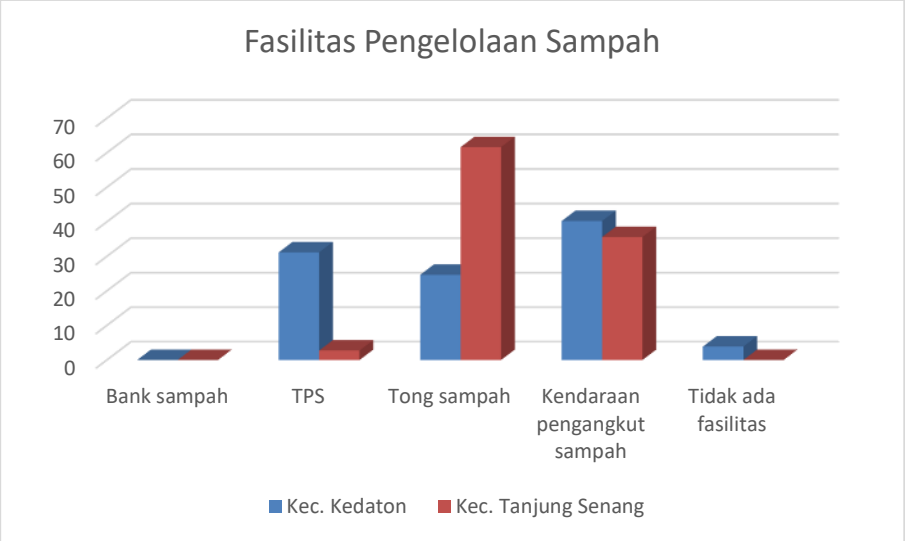

Gambar 2. Fasilitas Pengelolaan Sampah
Sumber: Data Penelitian, 2024

Persepsi responden di Kecamatan Kedaton saat diminta untuk menunjukkan fasilitas pengelolaan sampah apa saja yang ada disekitarnya. Sebanyak 40% menyebutkan kendaraan pengangkut sampah, 31% menyebutkan TPS, 25% menyebutkan tong sampah. Tidak ada yang menyebutkan bank sampah bahkan ada yang menyebutkan tidak ada fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 4%. Sementara di Kecamtan Tanjung Senang, sebanyak 62% menyebutkan tong sampah, 36% kendaraan pengangkut sampah, dan TPS sebanyak 3 %.

Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Pengangkutan Sampah

Keberadaan layanan pengangkutan sampah merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengadakan layanan ini untuk mendukung sampainya sampah di TPS bahkan TPA. Pasal 11 (1) a, dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

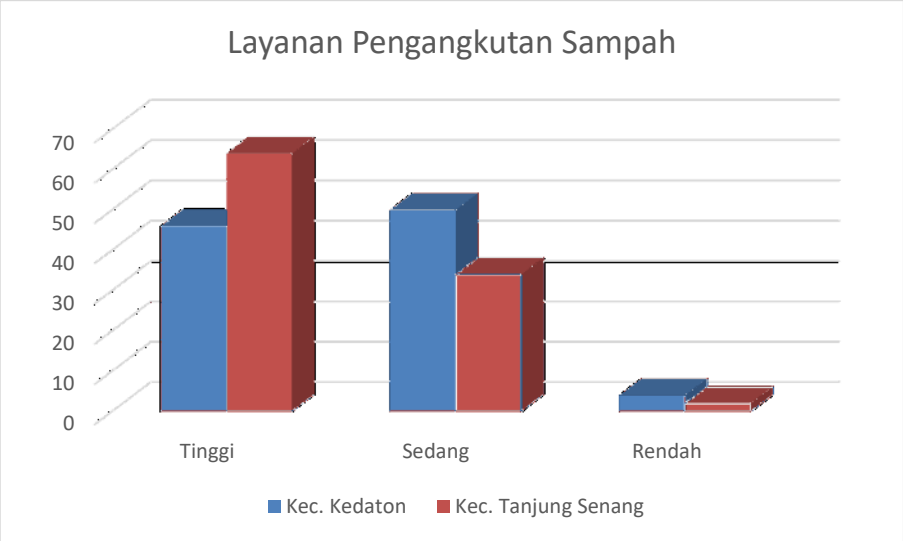

Gambar 3. Layanan Pengangkutan Sampah
Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa responden di Kecamatan Kedaton menilai layanan pengangkutan sampah tinggi sebanyak 46%, rendah sebanyak 59%, dan rendah sebanyak 4%. Sementara responden di Kecamatan Tanjung Senang menilai tinggi untuk layanan pengangkutan sampah sebanyak 64%, sedang sebanyak 34%, dan rendah sebanyak 2%.

Penilaian oleh responden ini juga didasari adanya keluhan yang disampaikan responden melalui kuesioner pada pertanyaan terbuka yaitu mengenai jam operasional pengangkutan sampah yang kurang bahkan terlambat sampai 2 hari sampah baru diangkut, sehingga terjadi penumpukan sampah di depan rumah warga. Ada pula keluhan responden bahwa terkadang saat sampah diangkut, ada sisa sampah yang berserakan bahkan jatuh di selokan sehingga terlihat kumuh.

Persepsi tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 9 ayat (1) Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sementara itu pada Pasal 6 disebutkan tugas pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

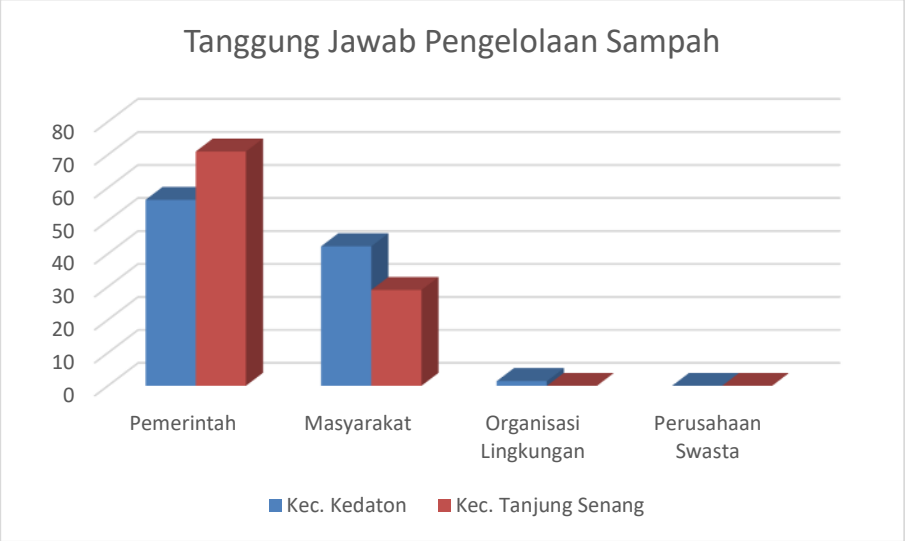

Gambar 4. Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah
Sumber: Data Penelitian, 2024

Responden di Kecamatan Kedaton sebanyak 56% beranggapan bahwa pemerintah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sampah, sebanyak 42% beranggapan bahwa Masyarakat yang memilliki tanggung jawab tersebut, dan 1% beranggapan yang memikul tanggung jawab adalah organisasi lingkungan hidup. Responden di Kecamatan Tanjung Senang sebanyak 71% menganggap pemerintah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sampah dan 29% menganggap Masyarakat yang memiliki tanggung jawab tersebut.

Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Sosialisasi pengolahan sampah merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Salah satu tugas pemerintah dan pemerintah daerah yaitu menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah pada Pasal 11 (1) e. Setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

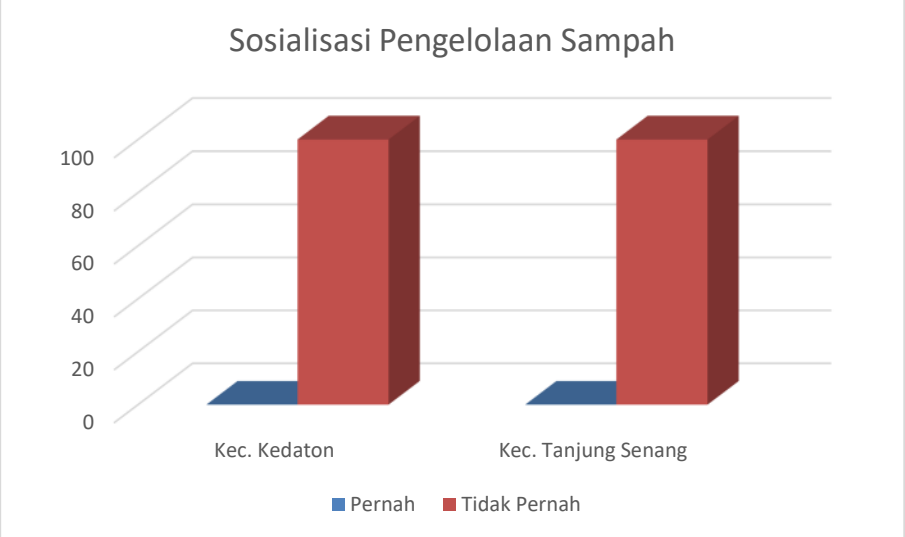

Gambar 5. Sosialisasi Pengelolaan Sampah
Sumber: Data Penelitian, 2024

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

Berdasarkan gambar grafik di atas, seluruh responden baik yang di Kecamatan Kedaton maupun yang di Kecamatan Tanjung Senang menjawab tidak pernah mendapatkan sosialisasi pengelolaan sampah. Ini mengindikasikan bahwa belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota mengenai pengelolaan sampah.

Persepsi Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah Mandiri

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 sesuai dengan (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

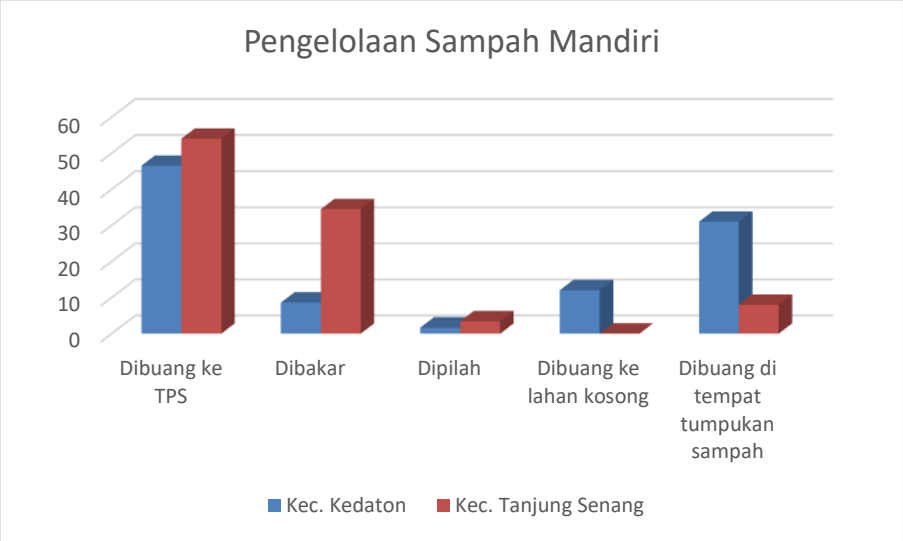

Gambar 6. Pengelolaan Sampah Mandiri
Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa responden di Kecamatan Kedaton sebanyak 47 %membuang sampah rumah tangganya ke TPS, 31% membuang sampah di tempat yang ada tumpukan sampah, 12% membuang sampah di lahan kosong, sebanyak 9% membakar sampah, dan hanya 2% yang memilah dalam pengelolaan sampah. Sementara responden di Kecamatan Tanjung Senang, dalam sebanyak 54% membuang sampah ke TPS, 34% dibakar, 8% membuang samaph di tempat tumpukan sampah, dan sebanyak 3% memilah sampah dalam pengelolaan sampahnya.

Persepsi tentang Kendala Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah kebanyakan dianggap masyarakat sebagai urusan pemerintah, padahal masyarakat juga memiliki pernan penting dalam pengelolaan sampah ini. Dorongan dari pemerintah membuat masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal pengurangan sampah maupun penanganan sampah. Namun untuk mencapai target yang ideal, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat memiliki beragam kendala.

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

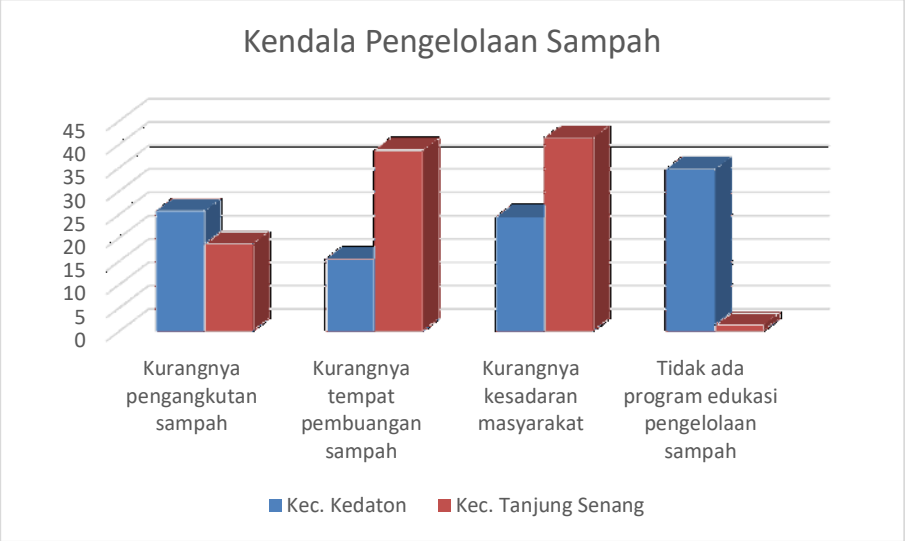

Gambar 7. Kendala dalam Pengelolaan Sampah
Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa responden di Kecamatan Kedaton sebanyak 35% menganggap bahwa kendala dalam pengelolaan sampah karena tidak ada program edukasi pengelolaan sampah. Kemudian sebanyak 26% karena kurangnya pengangkutan sampah, 24% kurangnya kesadaran masyarakat, dan 15% kendala dalam pengelolaan sampah karena kurangnya tempat pembuangan sampah. Sementara responden di Kecamatan Tanjumg Senang sebanyak 41% menilai bahwa kurangnya kesadaran Masyarakat menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Kemudian sebanyak 39 % karena kurangnya tempat pembuangan sampah, 19% menganggap karena kurangnya penganggkutan sampah, dan sebanyak 1% kendala pengelolaan sampah disebabkan tidak ada program edukasi pengelolaan sampah.

Masyarakat menaruh harpan besar kepada pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Ada beberapa hal yang penting dari saran responden kepada pemerintah, antara lain:

a. Berharap pemerintah turun langsung ke masyarakat melihat fasilitas yang tersedia di lingkungan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi dan juga kekurangan apa saja yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
b. Memperbaiki dan menambah fasilitas pengelolaan sampah, terutama layanan dan armada pengangkutan sampah.
c. Adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang benar.

PENUTUP

Persepsi pengelolaan sampah oleh pemerintah kota di Kecamatan Kedaton ada pada kategori sedang dan kategori tinggi di Kecamatan Tanjung Senang dan untuk persepsi layanan pengangkutan sampah kategori tinggi di Kecamatan Kedaton dan sedang di Kecamatan Tanjung Senang dan dari penelitian ditemukan bahwa masyarakat di kedua kecamatan tidak mengetahui tentang fasilitas bank sampah, serta tidak adanya sosialisasi pengelolaan sampah menurut masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

Masyarakat di kecamatan Kedaton kebanyakan membuang sampah di TPS atau di tempat tumpukan sampah. Sementara di Kecamatan Tanjung Senang, pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan dengan membuag ke TPS atau dibakar. Kebanyakan kendala pengelolaan sampah di Kecamtan Kedaton karena tidak adanya program edukasi pengelolaan sampah dan kurangnya pengangkutan sampah. Sementara di Kecamatan Tanjung Senang karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tempat pembuangan sampah

ISSN 1858-2400 (p)
ISSN 2656-9558 (e)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Desa Kalirejo dan seluruh aparat Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, serta tim penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). *Analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Selatan*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management), 8(1), 7-14.

Republik Indonesia.(2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Republik Indonesia.(2023). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Sampah, Bandar Lampung.

Republik Indonesia. 2018 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Singarimbun dan Effendy 2011, *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LP3ES. Bandung

Sugihartono. dkk, 2018. *Psikologi Pendidikan*. UNY Press, Yogyakarta
Yunus, H.S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.